



# SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) SATYA NEGARA PALEMBANG

Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Kerja pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Mayamin, SE., M. Si .....	1 – 15
Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur). Wahyu Widodo, M. Si .....	16 – 35
Pengaruh Pemekaran Kecamatan terhadap Pelayanan pada Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir). Fina Dian Arini, S. Ip., M. Si .....	36 – 43
Hubungan Penataan Kelembagaan Organisasi terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Sematang Borang Palembang. Citra Iasha, S. Psi., M. Si .....	44 – 58
Peranan Pengawasan Melekat terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Sako Kota Palembang .Eddy Jhon, SE., M. Si .....	59 – 73
Pengaruh Budaya Kerja Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Ilir Timur Kota Palembang. Siti Waliah, S. Ip., M. Si .....	74 – 93
Penempatan Pegawai dalam Menunjang Produktivitas Kerja pada Kantor Kecamatan Kertapati Palembang. Hj. Helda Fitriani, S. Pd., M. Si .....	94 – 111
Peran Pembagian Kerja dan Wewenang terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Kantor Camat Kecamatan Sako Kota Palembang. Yuliana, S. Sos, M.Si .....	112 – 128

<b>Jurnal</b> Ilmiah Administrasi dan Sosial	<b>Volume 10</b>	<b>Nomor</b> 10	<b>Halaman</b> 1-128	<b>Palembang</b> Januari - Juni 2016	<b>ISSN</b> 2086-8057
---	------------------	--------------------	-------------------------	--	--------------------------

**PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN  
TERHADAP PELAYANAN PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS  
KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

**Oleh :Fina Dian Arini, S. Ip., M. Si.**

**(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemekaran kecamatan Payaraman terhadap pelayanan pada masyarakat, mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh aparat Kecamatan Payaraman, dan untuk mengetahui korelasi antara dampak pemekaran kecamatan dengan pelayanan pada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif. Untuk mencari korelasi antar variabel, maka analisis yang digunakan adalah uji statistik dengan menggunakan data yang kuantitatif, yaitu mendeskripsikan data kualitatif dengan menggunakan skor, kemudian dicari koefisien korelasinya dengan menggunakan rumus product moment. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah dua variabel pokok yang terdiri dari variabel pemekaran kecamatan (x) dan variabel pelayanan (y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Kecamatan berpengaruh positif terhadap mutu pelayanan pada masyarakat di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini tergambar dari diterimanya hasil hipotesis yang diajukan. Adapun pemekaran kecamatan mempengaruhi mutu pelayanan pada masyarakat, ini menunjukkan pemekaran berjalan dengan baik dan lancar sehingga mutu dari pelayanan yang diberikan dapat menyentuh masyarakat.

*Kata Kunci : Pemekaran, Pelayanan, dan Otonom.*

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah otonom baru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan majunya suatu daerah, baik itu di sektor ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan. Pemekaran daerah hanyalah salah satu jalan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sangat bergantung kepada manajemen birokrasi pemerintahan, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di suatu daerah.

Selama kurun waktu lima tahun ini, euforia pemekaran terus meningkat tajam. Tahun 2006 saja, Departemen Dalam Negeri menerima hampir 90 usulan pemekaran Kabupaten / Kota dan 21 usulan pemekaran Provinsi. Usulan itu mulai dari yang hanya aspirasi masyarakat hingga yang sudah memenuhi syarat administratif. Begitu pula DPD menerima sekitar 50 usulan pemekaran Kabupaten / Kota dan 1 Provinsi. Di sisi lain, DPR menerima lebih sedikit, 39 usulan pemekaran Kabupaten / Kota. Usulan itu terus bertambah pada tahun 2007. Tarik ulur terus terjadi antara pemerintah dan DPR saat membahas puluhan usulan calon daerah baru di kurun waktu 2005- 2007. Selama dua tahun itu, pemerintah telah